

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

PARIWISATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

2.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mempercepat peningkatan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Pariwisata sebagai sektor yang kompleks harus mampu merealisasikan industri lainnya seperti kerajinan tangan, Cenderamata, penginapan dan transportasi (Salah Wahab (2003 dalam Rahma & Handayani 2013:4). Istilah pariwisata digunakan oleh mendiang Presiden Soekarno dalam percakapannya yang memiliki kata sebanding dengan *tourism* atau turisme. Kegiatan pariwisata bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan yang ditimbulkan dari efek perjalanan wisata. Adapun aspek yang berhubungan langsung dengan pariwisata adalah manusia, tempat/ruang, dan waktu (Soemanto, 2010:12). Menurut Mason (1990) dalam Soemanto (2010:14) pariwisata pada hakikatnya merupakan suatu perjalanan yang sifatnya sementara ke tempat-tempat tujuan wisata dengan maksud untuk rekreasi bukan bekerja. Sementara menurut Direktorat Jendral Pariwisata (1992) pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, contohnya usaha-usaha di sekitar objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain. Perkembangan pariwisata memiliki pengaruh ke arah yang positif, baik itu kepada masyarakat maupun pemerintah setempat.

Pariwisata dan kepariwisataan adalah suatu sistem kegiatan yang mempertemukan fungsi serta peranan dari berbagai unsur yang saling berhubungan dalam mewujudkan keberhasilan pariwisata. Adapun unsur-unsur tersebut di antaranya : daya tarik wisata di daerah tujuan wisata, pengunjung, biro perjalanan wisata, transportasi, akomodasi wisata, masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya. Dalam pengembangan pariwisata terdapat banyak faktor-faktor penting yang dapat mendukung kegiatan pariwisata yaitu lembaga/organisasi, dan orang atau kelompok sosial tertentu, karena mereka menyediakan pelayanan wisata yang

nantinya dibutuhkan oleh wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata. Pariwisata menggambarkan salah satu proses interaksi sosial yang dihubungkan baik itu oleh lembaga, individu/kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pengembangan pariwisata, selalu berkaitan erat dengan peran serta masyarakat sekitar, karena masyarakat merupakan salah satu penting dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata maka dapat memaksimalkan pengembangan pariwisata ke depannya. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata dikenal sebagai model perencanaan bottom up sesuai dengan model perencanaan di Indonesia. (Desa et al., 2014:3).

2.1.1 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menurut (Sutiarso, 2017:11) merupakan salah satu faktor penyumbang pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kawasan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata hal-hal yang menjadi pendukung dari kegiatan pariwisata seperti sarana dan prasarana pendukung wisata hendaknya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sesuai dengan selera wisatawan.

Untuk mewujudkan pariwisata yang berhasil tentunya harus ada partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi yang tinggi, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat sekitar maka pengembangan pariwisata tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Menurut Sunaryo (2013) dalam Sutiarso (2017:11), dalam pariwisata pemerintah hanyalah berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat sebagai tuan rumah memegang kendali atas berkembangnya pariwisata dan swasta hanya sebagai pengembang atau investor, sehingga dari ketiga pemangku kepentingan dalam pariwisata ini saling berhubungan satu sama lain.

Tujuan utama dalam melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah setempat. Dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintah harusnya menyediakan wadah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi agar perkembangan pariwisata ke depannya dapat berjalan dengan baik.

Untuk pengembangan pariwisata maka perlu kerjasama dari berbagai organisasi pariwisata baik itu pemerintah maupun swasta, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung kelanjutan pengembangan pariwisata daerah ke depannya.

2.2 Ekowisata

Ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang menggabungkan antara aspek lingkungan dan pariwisata (Imran, 2012:87). Ekowisata diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society (1990) sebagai suatu perjalanan wisata yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Australian Department of Tourism Black (1999 dalam Fandeli, 2000), ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata alam yang mengutamakan aspek lingkungan, karena dalam ekowisata para wisatawan yang berkunjung memiliki minat khusus terhadap objek daya tarik wisata alam tersebut. Sesuai dengan pernyataan Kadek and Setiawina (2018:4) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap keberlanjutan pariwisata begitu juga dalam pengembangan konsep ekowisata. Maka dari itu semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat sekitar kawasan wisata maka semakin baik perkembangan dan keberlanjutan wisata tersebut. Selain itu untuk mendukung keberhasilan penerapan konsep ekowisata dalam pengembangan pariwisata, ekowisata harus didukung oleh partisipasi dari komunitas lokal di sekitar kawasan wisata tersebut (Imran, 2012:85). Oleh karena itu partisipasi dari masyarakat bukan hanya sebatas keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan saja, melainkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan sampai dengan tahap pemanfaatan hasil sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar (Aziz, 2008:85).

Prinsip dan kriteria dalam pengelolaan ekowisata tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI – 8013, (2014 dalam Nafi, 2017:11) sebagai berikut :

1. Keberlanjutan fungsi ekosistem.
2. Kelestarian ODTWA.
3. Kelestarian sosial budaya.
4. Kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
5. Prinsip manfaat ekonomi.

Selain adanya prinsip dan kriteria dalam pengelolaan ekowisata terdapat pula tujuan dan sasaran dalam pengelolaan ekowisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata (DTW).
2. Mengkomunikasikan daya tarik wisata (DTW) dengan menggunakan media promosi secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan perekonomian daerah.
4. Mengembangkan kelompok dan tata kelola masyarakat pariwisata yang mampu menggerakkan semua kepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pengembangan ekowisata suatu kawasan wisata harus memiliki nilai potensi yang dapat dikembangkan yang telah memenuhi kriteria berdasarkan penilaian indikator yang mengacu pada Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO – ODTW).

2.2.1 ODTWA (Objek Daya Tarik Wisata Alam)

ODTWA (Objek Daya Tarik Wisata Alam) merupakan persediaan sumber daya alam seperti air terjun, sungai, hutan mangrove, gua dan lain sebagainya (Ditjen PHKA, 2003). Menurut Issn (2019:25) Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap obyek wisata alam dengan menggunakan instrumen penilaian kriteria untuk mengetahui ada atau tidak adanya sebuah potensi yang dapat dikembangkan di kawasan obyek wisata tersebut.

Menurut Riwayatiningasih, (2016:17) dalam melakukan penilaian terhadap pengembangan ODTWA maka diperlukan kriteria dan indikator sebagai dasarnya. Proses ini dilakukan melalui penetapan unsur kriteria, penetapan bobot, perhitungan masing-masing dari sub unsur dan kemudian menjumlahkan semua nilai unsur

kriteria tersebut, kemudian untuk mengetahui seberapa besar tingkat kelayakan suatu kawasan wisata agar bisa dikembangkan sebagai kawasan ekowisata maka skor yang telah diperoleh dibandingkan dengan skor total kriteria (Nabila and Widiyastuti n.d, 2016). Berikut ilustrasi penilaian:

$$\text{Nilai kelayakan ODTWA} = \frac{\text{Skor Kriteria}}{\text{Skor Total Kriteria}} \times 100\%$$

Menurut Karsuadi (2010 dalam Nabila and Widiyastuti n.d, 2016), setelah melakukan perbandingan, maka akan diperoleh indeks kelayakan dalam persen. Berikut indeks kelayakan suatu kawasan ekowisata adalah:

- Tingkat kelayakan >66,6% : layak dikembangkan
- Tingkat kelayakan 33,3% - 66,6% : belum layak dikembangkan
- Tingkat kelayakan <33,3% : tidak layak dikembangkan

Pembuatan kriteria ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar skala prioritas dalam pengembangan ODTWA. Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar utama penilaian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.1 Kriteria Penilaian ODTWA Air Terjun

No	Kriteria	Unsur	Bobot Nilai
1	Daya Tarik Wisata	Keunikan SDA	6
		Banyaknya SDA yang menonjol	
		Kepekaan SDA	
		Jenis kegiatan wisata alam	
		Kebersihan lokasi	
		Kenyamanan	
2	Kadar Hubungan Aksesibilitas	Kondisi dan jarak jalan darat dari pusat kota Way Kanan	5
		Tipe jalan	
		Waktu tempuh dari ibukota provinsi	

No	Kriteria	Unsur	Bobot Nilai
3	Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi	Status lahan	5
		Mata pencaharian	
		Pendidikan	
		Tingkat kesuburan tanah	
		SDA	
4	Pengelolaan dan Pelayanan	Pengelolaan	4
		Kemampuan berbahasa	
		Pelayanan wisata	
5	Sarana dan Prasarana	Prasarana (kantor pos, jaringan telepon, puskesmas, jaringan listrik dan jaringan minum)	3
		Sarana penunjang (warung, pasar, toko, souvenir dan angkutan umum)	
6	Ketersediaan Air Bersih	Volume air	6
		Jarak sumber air terhadap lokasi objek	
		Kemudahan air dialirkan ke objek wisata	
		Kelayakan dikonsumsi	
		Ketersediaan	
7	Pemasaran	Tarif/harga terjangkau	4
		Produk wisata (ODTWA) bervariasi	
		Sarana penyampaian informasi	
		Promosi	
8	Keamanan	Keamanan pengunjung	5
		Perambahan (penggunaan lahan)	

Sumber: Ditjen PHKA, 2003

2.3 Partisipasi

Menurut UU No.25 Tahun 2004, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam mendukung suatu kebutuhan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Keterlibatan masyarakat sekitar dapat dimulai dari tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap implementasi, dan sampai tahap pemantauan dan evaluasi (Kuswartojo dalam Sumarto, 2009:32). Partisipasi tidak hanya sekedar komunikasi satu arah saja melainkan adanya hubungan timbal balik antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Sesuai seperti yang dipaparkan oleh Syahdan dalam

Rohman (2009) bahwa kebanyakan khalayak ramai kurang paham mengenai partisipasi. Menurut Timothy (1999) terdapat dua pendapat untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Kedua pendapat tersebut adalah (1) keterlibatan masyarakat lokal pada proses pengambilan keputusan, dan (2) berkaitan dengan impact yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat di wilayah pengembangan pariwisata maka harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri serta mengarahkan pembangunan pariwisata agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Maka dari itu dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan dari masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat yang maksimal dari pengembangan pariwisata tersebut (Geogra & Gadjah, 2013:129).

2.3.1 Tingkat Partisipasi

Arnstein telah membagi tingkat partisipasi menjadi delapan tingkat yaitu Manipulasi, Terapi, Informasi, Konsultasi, Penenteraman, Kemitraan, Pelimpahan Kekuasaan, dan Kontrol Masyarakat. Berikut penjelasan dari masing-masing tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein yaitu :

(1) Kontrol masyarakat (*Citizen Control*)

Pada tingkat partisipasi kontrol masyarakat, masyarakat menginginkan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur program pengembangan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatur langsung proses pengembangan mulai dari tahap perencanaan hingga dengan tahap pemanfaatan hasil.

(2). Pelimpahan kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada tingkat partisipasi ini telah terjalin negosiasi antara masyarakat setempat dengan pemangku kepentingan yaitu pemerintah dalam pengambilan keputusan dimana masyarakatlah yang lebih dominan dalam menentukan keputusan.

(3). Kemitraan (*Partnership*)

Pada tingkat partisipasi ini telah adanya berbagai macam kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengambilan keputusan, dimana peran antara masyarakat dan pemerintah seimbang.

(4). Penenteraman (*Placation*)

Pada tingkat partisipasi ini telah terjalannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dan masyarakat telah diberikan kesempatan untuk berpendapat atau mengusulkan rencana, namun hanya pemerintah lah yang berwenang dalam mengambil keputusan.

(5). Konsultasi (*Consultation*)

Pada tingkat partisipasi ini pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi, namun pemerintah lah yang memutuskan apakah pendapat dari masyarakat tersebut dipakai atau tidak.

(6). Informasi (*information*)

Pada tingkat partisipasi ini pemerintah telah memberitahu kepada masyarakat mengenai berbagai macam program yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana.

(7). Terapi (*Therapy*)

Pada tingkat partisipasi ini keterlibatan masyarakat belum termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya, karena pemerintah telah memilih beberapa perwakilan dari masyarakat.

(8). Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat partisipasi ini pemerintah telah memilih beberapa perwakilan dari masyarakat yang fungsinya pada saat pemerintah mengajukan sebuah program maka para wakil masyarakat tersebut harus menyetujuinya.

Hal tersebut sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang ditulis oleh

Arnstein sebagai tangga jenjang peran serta partisipatif. Hakekat kesetaraan pada tangga tingkat partisipasi Arnstein dalam (Rosyida and Tonny Nasdian, 2011) dijadikan sebagai acuan pertanyaan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Kotaway. Berikut penjelasannya:

Tabel II.2 Tingkat partisipasi Masyarakat menurut Arnstein

No	Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkat Pembagian Kekuasaan
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan oleh Pemerintah	Tidak ada partisipasi
2	Terapi (Therapy)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
3	Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakau sarannya	
5	Penentraman (<i>Placation</i>)	Saran masyarakat didengar tapi tidak selalu dilaksanakan	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada dimasyarakat
7	Pendelegasian kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
8	Kontrol masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber: (Rosyida and Tonny Nasdian 2011)

2.3.2 Bentuk Partisipasi

Partisipasi dalam pengembangan pariwisata pasti memiliki bentuk. Menurut berbagai ahli terdapat bentuk partisipasi yang bisa diberikan oleh masyarakat pada suatu program pengembangan pariwisata. Bentuk partisipasi bisa dikelompokkan menjadi 2 yaitu, partisipasi dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan partisipasi dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi nyata misalnya

uang, harta benda, dan tenaga sedangkan untuk bentuk partisipasi yang tidak nyata dapat berupa buah pikiran, dan pengambilan keputusan. Menurut Holil dalam Deviyanti (2013:24), menyebutkan beberapa bentuk dalam partisipasi masyarakat, antara lain :

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan bentuk partisipasi yang diberikan dalam wujud nyata yaitu berupa tenaga yang mampu menunjang keberhasilan suatu program pengembangan pariwisata.
- b. Partisipasi dalam bentuk uang merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam wujud nyata yaitu berupa uang akan tetapi tidak atas dasar dipaksakan.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda merupakan bentuk partisipasi yang diberikan dalam wujud nyata yaitu berupa sumbangan harta benda yang biasanya alat-alat kerja atau perkakas.

Menurut Chapin dalam Deviyanti (2013:24), mengemukakan bentuk partisipasi masyarakat, antara lain : (a) Partisipasi uang, (b) Partisipasi buah pikiran, (c) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (d) Partisipasi representatif. Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat Menurut Huraerah, (2008:102) sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran.
- b. Partisipasi tenaga.
- c. Partisipasi harta benda.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
- e. Partisipasi sosial.

Sedangkan bentuk partisipasi menurut Ndraha (1990:3) terbagi menjadi 6 bentuk, sebagai berikut:

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain.
- b. Partisipasi dalam memberi tanggapan terhadap informasi.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

- e. Partisipasi dalam mengembangkan hasil pembangunan dan menilai hasil pembangunan.

2.5 Sintesis Variabel Penelitian

Sintesis penelitian ini merupakan tahap akhir dalam penentuan variabel-variabel yang akan digunakan untuk menganalisis variabel apa saja yang ada dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi ekowisata Curug Gangsa Desa Kotaway Kabupaten Way Kanan.

Tabel II.3 Sintesis Variabel Penelitian

Sumber	Hasil Kajian	Variabel	Variabel Terpilih
Sasaran I (Identifikasi Potensi Ekowisata Curug Gangsa Desa Kotaway Kabupaten Way Kanan)			
Direktorat Jendal perlindungan hutan dan koneservasi alam (PHKA 2003)	penilaian potensi ekowisata Curug Gangsa	1. Daya Tarik	Daya tarik
		2. Potensi Pasar	-
		3. Aksesibilitas	Aksesibilitas
		4. Kondisi Sekitar Kawasan	Kondisi Sekitar Kawasan
		5. Pengelolaan dan Pelayanan	Pengelolaan dan Pelayanan
		6. Iklim	-
		7. Akomodasi	-
		8. Sarana dan Prasarana Penunjang	Sarana dan Prasarana Penunjang
		9. Hubungan dengan Objek Wisata disekitarnya	-
		10. Keamanan	Keamanan
		11. Pengaturan Pengunjung	-
		12. Pemasaran	Pemasaran
		13. Pangsa Pasar	-
		14. Ketersediaan Air Bersih	Ketersediaan Air Bersih
		15. Daya Dukung Kawasan	-

Kajian	Variabel	Variabel Terpilih	Sumber
Sasaran 2 (Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan wisata Curug Gangsa)			
Tingkatan Partisipasi	Manipulasi (tidak adanya partisipasi dari masyarakat)	1. Manipulasi 2. Terapi 3. Pemberitahuan 4. Konsultasi 5. Penenteraman 6. Kemitraan 7. Pendelegasian 8. Kontrol Masyarakat	Arnstain (1969)
	Terapi (adanya partisipasi atas dasar kemauan sendiri)		
	Pemberitahuan (kehadiran masyarakat tanpa mendapat kesempatan dalam penilaian)		
	Konsultasi (adanya kehadiran dari masyarakat dan adanya kesempatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat)		
	Penenteraman (adanya kehadiran dari masyarakat namun ada pembatasan pendapat yang diperhitungkan)		
	Kemitraan (adanya kehadiran masyarakat dan memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan)		
	Pendelegasian kekuasaan (adanya kehadiran masyarakat dan memiliki hak tertinggi dalam pengambilan keputusan)		
	Kontrol Masyarakat (Masyarakat memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan)		

Kajian	Variabel	Variabel Terpilih	Sumber
Sasaran 3 (Identifikasi Bentuk Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan wisata Curug Gangsa)			
Bentuk-Bentuk Partisipasi	1. Partisipasi dalam bentuk tenaga 2. Partisipasi dalam bentuk uang 3. Partisipasi dalam bentuk harta benda	1. Pemikiran/Ide 2. Dana / Uang 3. Tenaga 4. Harta benda 5. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 6. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Holil Y dalam Deviyanti D (2013)
	1. Partisipasi uang 2. Partisipasi buah pikiran 3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 4. Partisipasi representatif		Chapin dalam Deviyanti D (2013)
	1. Partisipasi buah pikiran 2. Partisipasi tenaga 3. Partisipasi harta benda 4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran 5. Partisipasi sosial		Huraerah,(2008:102)
	1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain 2. Partisipasi dalam memerhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi 3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan 4. Partisipasi dalam pelaksanaan 5. Partisipasi dalam menerima 6. Partisipasi dalam menilai pembangunan		Ndraha (1990)

Sumber: Analisis Peneliti,2021